



## PENDEKATAN PROSES DAN MODEL-MODEL KEBIJAKAN

Khusna Nazila<sup>1</sup>, Ani Renita Sari<sup>2</sup>, Sri Mulyana<sup>3</sup>, Novem Ridhoansyah<sup>4</sup>, M. Nasor<sup>5</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[khusnanazilla1202@gmail.com](mailto:khusnanazilla1202@gmail.com), <sup>2</sup>[anirenita10@gmail.com](mailto:anirenita10@gmail.com), <sup>3</sup>[srimulyana2626@gmail.com](mailto:srimulyana2626@gmail.com),

<sup>4</sup>[nvmridho2018@gmail.com](mailto:nvmridho2018@gmail.com), <sup>5</sup>[nasor@radenintan.ac.id](mailto:nasor@radenintan.ac.id)

### Abstract

Public policy is a crucial instrument in determining the direction of development and societal welfare. However, in the Indonesian context, the policy process often faces various challenges such as weak cross-sectoral coordination, the dominance of political interests, and the lack of consistency in implementation and evaluation. This study aims to systematically analyze the policy process approach, examine the relevance of various policy models, and identify the gaps between theory and practice in Indonesia. The research employed a library research method by reviewing relevant literature including books, journal articles, research reports, and official documents. The findings reveal that Indonesia's policy process has not fully followed the ideal stages, as evaluation remains weak, agenda setting tends to be dominated by elite interests, and public participation is far from optimal. In terms of policy models, practice is largely dominated by the incremental model, although the rational model, mixed scanning, and advocacy coalition framework remain relevant depending on the issue. The study concludes that strengthening policy processes requires consistency across all stages, flexibility in selecting models based on context, improvement of bureaucratic capacity, and more inclusive public participation. Therefore, this research is expected to contribute to enhancing the quality of public policy governance in Indonesia.

**Keywords:** public policy, process approach, policy models, theory and practice

### Abstrak

Kebijakan publik merupakan instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam konteks Indonesia, proses kebijakan sering menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, dominasi kepentingan politik, serta rendahnya konsistensi dalam implementasi dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan proses kebijakan secara sistematis, mengkaji berbagai model-model kebijakan beserta relevansinya, serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam konteks Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kebijakan di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti tahapan ideal, di mana evaluasi masih lemah, agenda setting cenderung dipengaruhi kepentingan elit, dan partisipasi publik belum optimal. Dari sisi model kebijakan, praktik lebih banyak didominasi model inkremental, meskipun model rasional, *mixed scanning*, dan *advocacy coalition framework* tetap relevan sesuai konteks masalah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya konsistensi dalam setiap tahapan proses kebijakan, fleksibilitas dalam memilih model sesuai situasi, peningkatan kapasitas birokrasi, serta penguatan partisipasi publik yang lebih inklusif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki kualitas tata kelola kebijakan publik di Indonesia.

**Kata Kunci:** kebijakan publik, pendekatan proses, model kebijakan, teori dan praktik

## PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, sebab melalui kebijakanlah arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ditentukan. Dalam konteks global, organisasi seperti OECD (2023) melaporkan bahwa lebih dari 70% negara menghadapi tantangan serius dalam perumusan kebijakan, terutama dalam aspek implementasi dan evaluasi. Di Indonesia, keberhasilan kebijakan publik sering kali terhambat oleh masalah klasik seperti koordinasi lintas sektor yang lemah, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Kondisi ini menegaskan perlunya kerangka pendekatan yang sistematis, seperti pendekatan proses kebijakan (*policy process approach*) dan pemanfaatan model-model kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

Pentingnya pendekatan proses kebijakan muncul karena kompleksitas persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan keputusan politik semata. Proses kebijakan mencakup serangkaian tahap, mulai dari perumusan masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, hingga evaluasi. (Lele, 2024) menjelaskan bahwa pendekatan proses membantu aktor kebijakan memahami dinamika dan interaksi antaraktor, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif. Sementara itu, model-model kebijakan seperti *rational model*, *incremental model*, *mixed scanning*, dan *advocacy coalition framework* menawarkan perspektif teoretis untuk menganalisis bagaimana kebijakan terbentuk dan dijalankan dalam realitas sosial-politik.

Model kebijakan menegaskan adanya variasi pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahan. Misalnya, model rasional menekankan pentingnya data dan analisis komprehensif, sedangkan model inkremental menyoroti sifat evolutif dan kompromi dalam kebijakan. (Sore, 2017) dengan konsep *muddling through* menunjukkan bahwa kebijakan publik lebih sering bersifat bertahap daripada sepenuhnya rasional. Sebaliknya, (Yunus, 2021) melalui *mixed scanning* berupaya memadukan rasionalitas komprehensif dengan pragmatisme inkremental. Perkembangan terbaru seperti *advocacy coalition framework* dari (Kuswandoro, 2024) menekankan pentingnya koalisi aktor, ide, dan kepentingan dalam membentuk arah kebijakan.

Sejumlah penelitian empiris juga memperkuat relevansi penggunaan pendekatan proses dan model kebijakan. Penelitian oleh (Kharisma, 2014) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kesehatan di beberapa negara Asia dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan tahap-tahap proses kebijakan secara konsisten. Di

Indonesia, studi oleh (Lalu, 2021) menemukan bahwa kegagalan implementasi kebijakan lingkungan sering kali disebabkan oleh lemahnya tahapan evaluasi dan monitoring, serta dominasi model inkremental yang kurang memperhatikan analisis berbasis data. Temuan ini menegaskan pentingnya pemilihan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan serta pengelolaan proses yang terstruktur.

Namun demikian, terdapat kesenjangan (gap) antara teori dan praktik kebijakan di Indonesia. Meskipun teori proses kebijakan telah banyak diperkenalkan di lingkungan akademik, dalam praktiknya banyak kebijakan yang masih dibuat secara ad hoc, tergesa-gesa, atau sekadar sebagai respons terhadap tekanan politik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menginternalisasi kerangka kerja proses kebijakan sebagai pedoman baku. Di sisi lain, penggunaan model-model kebijakan seringkali hanya sebatas wacana akademik dan jarang diimplementasikan dalam analisis kebijakan yang nyata, sehingga kehilangan relevansinya untuk memecahkan persoalan publik yang kompleks. Kesenjangan lainnya terlihat dalam aspek partisipasi publik. Teori-teori kebijakan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, baik dalam agenda setting maupun evaluasi. Hal ini menimbulkan permasalahan serius karena kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan proses dan model kebijakan belum dioptimalkan untuk menjamin inklusivitas dan responsivitas kebijakan. Permasalahan kapasitas birokrasi juga menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan pendekatan proses dan model kebijakan. Secara teoritis, birokrasi dituntut untuk memiliki kemampuan analisis, koordinasi, dan monitoring yang baik.

Melihat berbagai persoalan tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai penerapan pendekatan proses dan model-model kebijakan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi konseptual, tetapi juga mencoba menganalisis bagaimana teori-teori tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks kebijakan di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan dapat ditemukan pola atau strategi yang lebih efektif untuk mengurangi gap antara teori dan praktik. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kebijakan publik dengan menyoroti tantangan dan peluang dalam penerapan model-model kebijakan di tingkat nasional maupun lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pendekatan proses kebijakan secara sistematis, mengkaji berbagai model-model kebijakan beserta relevansinya, serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam konteks Indonesia. Dengan analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat proses kebijakan, meningkatkan

kualitas formulasi, implementasi, dan evaluasi, serta memperluas pemahaman akademik mengenai model-model kebijakan. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola kebijakan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang menekankan pada pengumpulan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan topik pendekatan proses dan model-model kebijakan. Penelitian kepustakaan dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, sehingga lebih tepat dianalisis melalui kajian pustaka yang mendalam. Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku teks kebijakan publik, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi lembaga internasional yang kredibel. Data diperoleh melalui pencarian di berbagai basis data daring seperti Google Scholar, ProQuest, dan Garuda, dengan menggunakan kata kunci “policy process approach”, “policy models”, “kebijakan publik Indonesia”, serta “analisis kebijakan”. Dari hasil pencarian awal, literatur yang dipilih kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, kebaruan dan validitas akademik. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keandalan dan relevansi tinggi terhadap permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema, yaitu konsep pendekatan proses kebijakan, model-model kebijakan, serta gap antara teori dan praktik. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, literatur yang telah terpilih dianalisis secara kritis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta keterkaitan antar kajian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), dengan cara mengidentifikasi argumen utama, pola temuan, serta relevansi literatur terhadap konteks Indonesia. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif dan deduktif, yaitu dengan menyintesis temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang penerapan pendekatan proses dan model kebijakan. Dengan demikian, penelitian kepustakaan ini tidak hanya mendeskripsikan literatur yang ada, tetapi juga memberikan interpretasi baru yang dapat menjembatani teori dengan realitas kebijakan publik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### **Analisis Pendekatan Proses Kebijakan secara Sistematis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan proses kebijakan di Indonesia masih dipahami sebatas tahapan formal, tanpa benar-benar diinternalisasi dalam praktik penyusunan kebijakan. Secara teoritis, tahapan proses kebijakan meliputi perumusan masalah, agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Namun dalam kenyataannya, banyak kebijakan publik hanya berhenti pada tahap formulasi dan adopsi, sementara implementasi dan evaluasi sering kali diabaikan atau dilakukan secara terburu-buru. Hal ini terlihat jelas pada kebijakan di sektor pendidikan, di mana program sering digulirkan tanpa mekanisme evaluasi yang jelas, sehingga sulit menilai keberhasilan atau kegagalannya secara objektif.

Analisis lebih jauh memperlihatkan bahwa proses kebijakan di Indonesia kerap dipengaruhi oleh dinamika politik jangka pendek. Agenda setting, misalnya, lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elit politik dan tekanan kelompok tertentu ketimbang hasil identifikasi masalah yang berbasis data. Hal ini menyebabkan kebijakan yang lahir tidak selalu menjawab kebutuhan masyarakat luas. Sebagai contoh, dalam penyusunan kebijakan lingkungan, banyak program yang lebih menonjolkan citra pemerintah ketimbang keberlanjutan lingkungan, sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara tujuan kebijakan dengan implementasi nyata.

Dari segi koordinasi antar lembaga, pendekatan proses kebijakan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya koordinasi lintas kementerian sering menjadi penghambat utama dalam menjaga konsistensi proses kebijakan. Hal ini berdampak pada implementasi kebijakan yang terfragmentasi, bahkan saling bertentangan antar sektor. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya bersifat komprehensif justru terjebak dalam kepentingan sektoral. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses kebijakan belum berjalan sesuai kerangka teoritis yang menekankan konsistensi lintas tahapan dan integrasi antar aktor.

Meskipun demikian, terdapat pula perkembangan positif. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai mengadopsi pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*) pada tahap formulasi kebijakan. Hal ini terlihat dari penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS) maupun hasil riset akademik sebagai acuan. Namun penerapan ini belum menyeluruh dan masih terbatas pada isu-isu tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh tahapan proses kebijakan, mulai

dari agenda setting hingga evaluasi, benar-benar memanfaatkan basis data dan bukti empiris sebagai landasan utama.

Penelitian juga menemukan adanya peran aktor non-pemerintah yang semakin besar dalam memengaruhi proses kebijakan. Lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta media massa mulai berpartisipasi aktif dalam tahap perumusan masalah maupun evaluasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori kebijakan yang menekankan pentingnya partisipasi publik. Namun, partisipasi ini sering kali tidak seimbang karena lebih didominasi oleh kelompok dengan akses sumber daya besar, sementara masyarakat akar rumput masih kurang terlibat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meski pendekatan proses kebijakan mulai terbuka, inklusivitasnya masih menjadi persoalan.

Analisis sistematis menunjukkan bahwa pendekatan proses kebijakan di Indonesia belum berjalan utuh sebagaimana teori yang ideal. Masih terdapat distorsi politik, lemahnya koordinasi birokrasi, serta partisipasi publik yang belum merata. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan setiap tahapan proses kebijakan agar lebih konsisten, transparan, dan berbasis data. Hal ini menjadi landasan penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan memastikan bahwa kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

### **Kajian Berbagai Model Kebijakan dan Relevansinya**

Hasil penelitian menemukan bahwa model rasional masih menjadi rujukan dominan dalam pembahasan akademik mengenai kebijakan di Indonesia, meskipun penerapannya dalam praktik sangat terbatas. Model ini menuntut proses analisis mendalam berbasis data komprehensif dan pertimbangan objektif terhadap berbagai alternatif kebijakan. Namun dalam kenyataan, keterbatasan sumber daya, waktu, serta dominasi kepentingan politik membuat model rasional sulit diimplementasikan secara penuh. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan hanya menggunakan pendekatan rasional secara parsial, terutama pada tahap awal perumusan.

Sebaliknya, model inkremental tampak lebih relevan dengan praktik kebijakan di Indonesia. Banyak kebijakan yang dilaksanakan secara bertahap dengan perubahan kecil dari kebijakan sebelumnya. Model ini dianggap lebih realistis karena sesuai dengan kondisi birokrasi dan politik yang kompleks. Namun kelemahannya adalah kebijakan inkremental cenderung lamban dalam merespons masalah besar dan mendesak. Misalnya, kebijakan penanganan perubahan iklim di Indonesia sering berjalan dengan pendekatan inkremental, sehingga hasilnya tidak signifikan dalam jangka pendek maupun panjang.

Model *mixed scanning* yang dikembangkan oleh Etzioni juga terbukti relevan dalam konteks Indonesia, karena mampu memadukan analisis komprehensif dengan fleksibilitas perubahan bertahap. Dalam praktiknya, model ini tampak dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang memadukan grand design jangka panjang dengan penyesuaian teknis di lapangan. Namun, penerapan model ini masih terbatas pada sektor tertentu dan membutuhkan kapasitas analisis yang lebih tinggi dari birokrasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana memperluas penerapan model *mixed scanning* ke berbagai sektor kebijakan lain.

Selain itu, *advocacy coalition framework* (ACF) semakin menonjol dalam menganalisis dinamika kebijakan di Indonesia. Model ini menekankan pentingnya koalisi aktor dengan nilai, ide, dan kepentingan yang sama dalam memengaruhi arah kebijakan. Penelitian menemukan bahwa ACF sangat relevan untuk menjelaskan proses kebijakan lingkungan dan kesehatan, di mana berbagai aktor non-pemerintah, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil membentuk koalisi advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan. Namun demikian, koalisi ini seringkali berhadapan dengan resistensi dari aktor politik dan ekonomi yang memiliki kekuatan lebih besar.

Relevansi model kebijakan juga terlihat dari keberagaman konteks masalah yang dihadapi Indonesia. Tidak ada satu model pun yang benar-benar unggul untuk semua situasi. Model rasional lebih tepat digunakan untuk masalah teknis yang dapat diukur secara jelas, model inkremental cocok untuk situasi politik yang penuh kompromi, model *mixed scanning* relevan untuk kebijakan pembangunan berskala besar, dan ACF sangat berguna dalam kebijakan yang sarat konflik kepentingan antaraktor. Dengan demikian, fleksibilitas dalam memilih model menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap berbagai model kebijakan memberikan landasan teoretis yang penting bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Namun, relevansi model tidak hanya ditentukan oleh teori, melainkan juga oleh kapasitas birokrasi, kondisi politik, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan kontekstual dalam penerapan model kebijakan, agar analisis yang digunakan benar-benar sesuai dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.

### **Identifikasi Kesenjangan antara Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia**

Hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara teori proses kebijakan dengan praktik kebijakan di Indonesia. Secara teoritis, kebijakan publik idealnya mengikuti tahapan yang runtut dan logis, namun dalam praktik sering terjadi lompatan tahapan atau pengabaian terhadap tahap evaluasi. Hal ini menyebabkan

kebijakan yang dihasilkan tidak terukur dengan baik keberhasilannya. Misalnya, beberapa kebijakan subsidi energi digulirkan tanpa evaluasi komprehensif terhadap dampaknya bagi masyarakat miskin, sehingga manfaatnya tidak tepat sasaran.

Kesenjangan juga terlihat dalam pemanfaatan model kebijakan. Meskipun model-model seperti rasional, inkremental, dan ACF telah banyak dikaji di lingkungan akademik, dalam praktiknya analisis kebijakan jarang menggunakan model secara eksplisit. Banyak kebijakan lahir hanya sebagai respon politik jangka pendek, bukan berdasarkan analisis mendalam yang terstruktur sesuai dengan model tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya disonansi antara pemahaman teoretis dan penerapan praktis. Dari sisi partisipasi publik, teori menekankan pentingnya inklusivitas dalam setiap tahapan kebijakan. Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap konsultasi formal yang sering kali bersifat simbolis. Penelitian menemukan bahwa suara kelompok marginal jarang dipertimbangkan secara serius dalam proses kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan kurang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik.

Keterbatasan kapasitas birokrasi juga menjadi salah satu faktor kesenjangan. Teori mengasumsikan adanya kemampuan teknokratis dalam melakukan analisis kebijakan, namun dalam praktik banyak birokrat yang belum memiliki literasi kebijakan yang memadai. Akibatnya, kebijakan sering disusun dengan pertimbangan politis semata tanpa analisis data yang komprehensif. Hal ini semakin memperlebar jurang antara teori dan praktik. Selain itu, faktor kepentingan politik menjadi penghalang utama penerapan teori kebijakan secara konsisten. Teori menekankan objektivitas dan rasionalitas, tetapi praktik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan partai, kelompok elit, atau kepentingan elektoral jangka pendek. Dengan demikian, teori kebijakan yang ideal sulit diwujudkan dalam sistem politik yang masih sarat dengan kepentingan pragmatis.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa kesenjangan antara teori dan praktik kebijakan di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga faktor struktural dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam kapasitas birokrasi, penguatan partisipasi publik, serta pengurangan dominasi kepentingan politik dalam proses kebijakan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan teori kebijakan dapat lebih relevan dalam praktik dan mampu menghasilkan kebijakan publik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini berfokus pada upaya memahami bagaimana pendekatan proses kebijakan dan model-model kebijakan dipraktikkan dalam konteks Indonesia, serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan realitas di lapangan. Hasil

penelitian yang telah dipaparkan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara idealitas teori dengan praktik kebijakan publik, khususnya terkait konsistensi tahapan kebijakan, relevansi model kebijakan, partisipasi publik, serta kapasitas birokrasi. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengaitkan temuan penelitian dengan berbagai teori dan kajian empiris sebelumnya, untuk memperlihatkan posisi penelitian ini dalam khazanah literatur kebijakan, sekaligus menyoroti kontribusinya dalam memperkaya diskursus tentang efektivitas kebijakan publik di Indonesia.

Hasil penelitian yang menunjukkan belum optimalnya penerapan pendekatan proses kebijakan di Indonesia sejalan dengan teori (Fischer et al., 2021) mengenai *policy cycle*, yang menekankan pentingnya tahapan sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Namun, kenyataan bahwa implementasi dan evaluasi sering diabaikan memperkuat temuan (Subianto, 2020) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik di Indonesia cenderung berhenti pada tahap perumusan dan adopsi. Hal ini memperlihatkan adanya inkonsistensi antara teori dan praktik, di mana seharusnya evaluasi menjadi instrumen kunci untuk memperbaiki kebijakan yang sedang berjalan. Dengan demikian, penguatan tahap evaluasi menjadi penting agar siklus kebijakan tidak terputus di tengah jalan.

Ditemukannya dominasi kepentingan politik dalam agenda setting juga memperkuat analisis (Setiyono, 2019) dengan konsep *muddling through*, yang menjelaskan bahwa kebijakan sering kali tidak lahir dari analisis rasional menyeluruh, melainkan dari kompromi politik bertahap. Penelitian (Sari & Ibrahim, 2023) juga menunjukkan bahwa faktor politik dan aktor dominan memiliki peran signifikan dalam menentukan arah kebijakan di negara-negara berkembang. Dengan demikian, meskipun teori ideal menekankan rasionalitas, praktik di Indonesia menunjukkan kecenderungan kuat terhadap model inkremental yang lebih pragmatis, meski mengorbankan efektivitas jangka panjang.

Relevansi berbagai model kebijakan dalam konteks Indonesia memperlihatkan bahwa tidak ada satu model pun yang mampu menjawab semua tantangan. Temuan bahwa model inkremental lebih dominan dalam praktik sesuai dengan kajian (Nugroho, 2021) yang mengkritik model rasional karena sulit diterapkan dalam realitas kompleks. Sebaliknya, model *mixed scanning* menawarkan alternatif yang lebih realistis dengan menggabungkan analisis jangka panjang dan langkah bertahap. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Arshanti et al., 2017) yang menekankan perlunya mempertimbangkan dinamika aktor dan kepentingan, sebagaimana dijelaskan dalam *advocacy coalition framework*. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam memilih model kebijakan sesuai dengan situasi dan masalah yang dihadapi.

Kesenjangan antara teori dan praktik yang ditemukan dalam penelitian ini juga relevan dengan temuan (Subekti et al., 2025), yang menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam proses kebijakan di Indonesia. Teori partisipatif menekankan bahwa pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Namun, praktik menunjukkan bahwa partisipasi lebih sering bersifat formalitas. Hal ini berimplikasi pada kurangnya responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Jika dibandingkan dengan model *advocacy coalition framework*, seharusnya partisipasi publik dapat diperkuat melalui pembentukan koalisi yang inklusif, bukan hanya melibatkan kelompok elit.

Keterbatasan kapasitas birokrasi yang ditemukan dalam penelitian ini juga memperkuat argumen (FATHIYA & Sudarmono, 2025) bahwa rendahnya literasi kebijakan di kalangan birokrat menjadi penghambat serius dalam implementasi kebijakan yang berbasis data. Teori kebijakan modern seperti *evidence-based policy* menekankan pentingnya pemanfaatan data dan riset akademik dalam pengambilan keputusan. Namun, praktik di Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang besar pada kepentingan politik dan intuisi subjektif pembuat kebijakan. Kondisi ini memperlebar kesenjangan antara teori normatif dan realitas birokrasi.

Kesenjangan antara teori dan praktik kebijakan di Indonesia merupakan hasil kombinasi dari faktor struktural, politik, dan kapasitas birokrasi. Teori-teori kebijakan seperti *policy cycle*, model rasional, inkremental, *mixed scanning*, hingga *advocacy coalition framework* memberikan kerangka analitis yang penting, namun penerapannya harus disesuaikan dengan konteks sosial-politik Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat gagasan bahwa pengembangan kebijakan publik di Indonesia membutuhkan pendekatan hibrid yakni menggabungkan teori normatif dengan adaptasi kontekstual agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kerangka teoritis, tetapi juga responsif terhadap dinamika politik, sosial, dan kebutuhan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyajikan analisis yang komprehensif mengenai pendekatan proses kebijakan dan berbagai model-model kebijakan dengan menempatkannya secara langsung dalam konteks Indonesia. Sebelumnya, sebagian besar kajian tentang proses dan model kebijakan di Indonesia masih bersifat deskriptif atau hanya mengulas teori secara konseptual tanpa menautkannya dengan realitas empirik di lapangan. Penelitian ini berbeda karena mengidentifikasi secara sistematis bagaimana tahapan proses kebijakan berjalan, model-model kebijakan apa saja yang paling relevan, serta di mana letak kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting berupa kerangka analisis hibrid yang menggabungkan pemahaman teoretis dengan

kondisi faktual di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam memilih model kebijakan sesuai konteks, serta menekankan perlunya reformasi birokrasi dan partisipasi publik yang lebih inklusif agar kebijakan lebih responsif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga hasilnya bergantung pada literatur yang tersedia, tanpa melibatkan data lapangan atau wawancara dengan aktor kebijakan yang dapat memperkaya perspektif. Kedua, cakupan literatur yang digunakan masih terbatas pada sumber-sumber utama yang relevan, sehingga belum sepenuhnya mencakup seluruh kebijakan sektor di Indonesia yang beragam dan kompleks. Ketiga, analisis yang dilakukan lebih menekankan pada aspek normatif dan teoritis, sehingga rekomendasi yang diberikan masih bersifat umum dan perlu diuji lebih lanjut dalam konteks kebijakan tertentu. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan dengan pendekatan empiris, misalnya melalui studi kasus kebijakan spesifik, agar hasil analisis lebih mendalam, kontekstual, dan aplikatif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan proses kebijakan di Indonesia belum berjalan secara sistematis sebagaimana digariskan dalam teori, karena implementasi dan evaluasi sering terabaikan, agenda setting masih dipengaruhi kepentingan politik, serta partisipasi publik cenderung bersifat formalitas; sementara dari sisi model kebijakan, praktik di Indonesia lebih banyak dipengaruhi model inkremental, meskipun model rasional, *mixed scanning*, dan *advocacy coalition framework* tetap relevan untuk konteks tertentu; di sisi lain, kesenjangan antara teori dan praktik masih terlihat jelas akibat lemahnya kapasitas birokrasi, minimnya penggunaan data dalam pengambilan keputusan, serta dominasi kepentingan politik jangka pendek. Kesimpulan dari temuan ini adalah bahwa penguatan proses kebijakan membutuhkan konsistensi dalam setiap tahap, pemilihan model kebijakan yang fleksibel sesuai konteks, serta peningkatan kapasitas birokrasi dan partisipasi publik yang lebih substansial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan tiga hal: pertama, memperluas penerapan *evidence-based policy* untuk memastikan kebijakan berbasis data; kedua, meningkatkan kapasitas birokrasi melalui pelatihan analisis kebijakan dan manajemen lintas sektor; dan ketiga, mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif melalui mekanisme deliberatif agar kebijakan tidak hanya menjadi instrumen politik, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Arshanti, L., Kartodihardjo, H., & Khan, A. (2017). Masalah Dan Kebijakan Sertifikasi

- Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari: Penerapan Advocacy Coalition Framework. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 137-148.
- FATHIYA, H., & Sudarmono, S. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA BERBASIS APLIKASI RUMAH DATA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI RIAU. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Baihaqi, I. (2021). *Teori Siklus Kebijakan: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1-34.
- Kuswandoro, W. E. (2024). *Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society dan Kepartaian*. Universitas Brawijaya Press.
- Lalu, S. U. (2021). Model implementasi interaksi pemberdayaan pada kebijakan dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa (Model kompromistis. *Model Implementasi Interaksi Pemberdayaan Pada Kebijakan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Model Kompromistis)*, 1-156.
- Lele, G. (2024). *Kebijakan publik untuk transformasi sosial: Sebuah pendekatan kritis-agonistik*. UGM PRESS.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Sari, C. D. P., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464-2473.
- Setiyono, B. (2019). *Konsepsi dan Perbandingan Politik*. Semarang: Eprints UNDIP.
- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik (Vol. 1)*. Sah Media.
- Subekti, T., Supriyatno, B., & Hakim, A. (2025). Partisipasi Publik Dalam Proses Anggaran Pada Ruang Lingkup Rendahnya Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(1), 88-100.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Yunus, M. (2021). *Metode dan Model Pengambilan Keputusan (The Way To Success)*. Penerbit Adab.